

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia beserta segala makhluk hidup yang ada di bumi adalah suatu siklus yang saling terkait satu sama lain, atau dalam arti lain selalu mengalami gesekan setiap saat karena berada dalam satu dimensi yang sama. Hubungan timbal balik antara manusia, makhluk hidup dan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain walau pun seiring dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di abad ke-21 ini. Isu global antara hubungan manusia dan lingkungan terkadang masih menjadi pembicaraan yang mendalam mengingat ditemukannya dampak-dampak konkrit yang menekan mutu dan kualitas lingkungan hidup. Seiring dengan kemajuan IPTEK, kepentingan dan kebutuhan manusia tidak dapat dibendung sehingga kadang kala terjadi pemanfaatan besar-besaran (eksploitasi) tanpa menganalisis dampak keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan lingkungan hidup yang secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah cara hidup yang tidak bijak (Rusdina, 2015).

Sumber daya lingkungan kerap diposisikan hanya sebagai objek sasaran sehingga eksploitasi berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu manusia untuk termotivasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing, dengan cara memanfaatkan potensi alam di sekitar. Ketika keseimbangan ekosistem lingkungan tidak seimbang, maka permasalahan baru muncul ke permukaan dan pada ujungnya

akan berdampak kepada kehidupan manusia (masyarakat itu sendiri). Ada tarik-menarik antara aspek kebutuhan manusia, cara melihat lingkungan, dan situasi ideal perihal bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan hidupnya. Permasalahannya memang sangat kompleks, akan tetapi mau tidak mau manusia harus benar-benar jeli dan bijaksana dalam memahami masalah ini. Secara sifat manusia merupakan makhluk yang memiliki sisi ketergantungan besar terhadap ekosistem lingkungan sekitar sehingga secara paksa manusia akan menuntut suatu lingkungan untuk tetap eksis dalam menjamin ketersediaan kebutuhan sehari-hari. Idealnya manusia merupakan makhluk berbudaya yang melekat nilai adab serta moralitas di dalam diri, termasuk nilai tanggung jawab yang sejatinya dapat mengimbangi kualitas lingkungan hidup. Hakekat hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dapat diuji dari seberapa besar hubungan timbal balik antar keduanya, karena manusia dan lingkungan merupakan bagian dari mata rantai ekosistem (Rusdina, 2015).

Pengelolaan lingkungan hidup sejatinya memerlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta yang tentunya perlu untuk mengedepankan aspek tanggung jawab sosial karena ketiga *stakeholder* tersebut adalah keseluruhan pelaku yang berpotensi untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui cara-cara bijak. Prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah lebih dibebankan kepada pihak pemerintah, yang seharusnya memiliki kualitas SDM pemerintahan secara mumpuni serta komitmen kuat untuk mengusahakan terjaganya ekosistem lingkungan yang berkelanjutan (Nahrudin & Tambajong, 2017). Menurut

Nahrudin (2018) kualitas SDM pemerintahan sangat menaruh peranan sentral dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, dimana mencakup keberhasilan program, pencapaian, evaluasi, sasaran pembangunan, implementasi, perencanaan, dan lain sebagainya.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang keberadaannya sulit untuk dikendalikan serta masif terjadi di Indonesia adalah polusi akibat dari terbengkalainya pengelolaan sampah di Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, maka kepadatan aktivitas juga turut membumbung tinggi terutama di daerah yang ramai akan permukiman. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat menjadi semakin terbengkalai ketika tidak ada bentuk aturan, himbauan, bahkan sanksi yang tegas dari pemerintah sehingga menyebabkan terbentuknya pola hidup acuh. Chaerul (2007) menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya disebabkan karena beberapa aspek seperti kurangnya tindakan/sanksi hukum yang tegas, minimnya ketersediaan tempat pembuangan, kurangnya usaha dalam melakukan usaha/teknik kompos, serta kurangnya manajemen di TPA secara kreatif.

Peningkatan jumlah angka buangan/sisa residu sangat berkaitan erat dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk secara alami. Esensinya laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan produktivitas dan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga output berupa buangan/residu pun ikut mencapai skala peningkatan. Sisa buangan/residu identik disebut dengan sampah yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu zat/material sisa yang tidak lagi dibutuhkan

keberadaannya oleh manusia/masyarakat. Sampah dapat dikategorikan sebagai siklus akhir aktivitas manusia yang tidak dapat hilang dari permukaan bumi begitu saja mengingat sifatnya berupa zat/material. Secara tidak langsung, kehidupan manusia (masyarakat) di satu sisi memiliki konsekuensi jangka panjang sebagai akibat dari beragam aktivitas. Sampah/buangan/sisa residu adalah siklus alamiah yang sejatinya memang harus disadari maupun dicarikan manajemen solusi secara cerdas oleh berbagai pihak termasuk masyarakat dan pemerintah (Kahfi, 2017).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan akut akibat sampah adalah kabupaten Ponorogo tepatnya di salah satu lokasi TPA Desa Mrican Kec. Jenangan. Permasalahan sampah yang setiap harinya hampir menampung kurang lebih sekitar 50 ton sampah serta mencapai ketinggian hingga 10 meter juga turut menyebabkan tidak adanya penghargaan Piala Adipura bagi kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sapto Djatmiko mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah yang berjalan hingga hari ini masih menggunakan sistem ditumpuk tanah. Lahan TPA yang luasnya sekitar 2 Ha pada akhirnya telah mencapai limit (overload) sehingga Pemkab Ponorogo berencana untuk melakukan penambahan lahan baru dalam agenda program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana pembebasan lahan baru guna dialihfungsikan sebagai TPA tambahan sudah dicanangkan sejak tahun 2019 dengan biaya kisaran sekitar 6-9 Milyar. Sementara itu solusi sementara yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo untuk mengurangi pasokan sampah yang masuk ke

TPA desa Mrican adalah dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat serta mendirikan rumah kompos di dua kecamatan berbeda yakni kecamatan Kauman dan Kecamatan Balong (Kominfo, 2018).

Prediksi akan terjadinya longsor serta kebakaran sampah akibat kandungan gas metana yang kian hari kian meningkat juga disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo melalui Kepala Dinas Sapto Djatmiko memprediksi bahwa dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, TPA Mrican tidak akan mampu lagi menampung sampah. Pihak pemerintah Ponorogo melalui DLH telah mengaku sudah memiliki proyeksi untuk pembukaan lahan baru dengan mengandalkan tanah kepemilikan pemkab seluas 1,6 hektare serta tanah milik penduduk sekitar dengan luas 3 hektare. Sapto Djatmiko menegaskan bahwa apabila realisasi proyeksi tersebut berjalan lancar maka sudah cukup untuk mengurai permasalahan sampah yang ada di Ponorogo sejak beberapa tahun silam (Dwiono, 2021).

Proyeksi yang dicanangkan oleh DLH kabupaten Ponorogo nampaknya tidak luput dari pengamatan publik, yakni datang dari Komunitas Ponorogo Resik-Resik (PRR) dengan anggapan bahwa penambahan maupun perluasan lahan TPA bukan solusi bijak. Alasan yang dikemukakan adalah, jika hanya mengandalkan TPA maka masyarakat luas tidak akan memiliki kesadaran untuk mengelola sampah pada tingkatan paling kecil (rumah tangga). Masyarakat akan cenderung berkuat pada pola hidup yang sama dan secara tidak langsung tidak peduli dengan nasib dari sampah-sampah hasil konsumsi mereka sendiri. Substansi nya, komunitas peduli lingkungan PRR memiliki prinsip agar

pemerintah (DLH) mampu untuk mengupayakan, melatih pemikiran dan kebiasaan masyarakat untuk sama-sama melibatkan diri menjadi bagian dari proses dan solusi agar terwujud sinergi kolektif dalam menyangga problem lingkungan (Gema Surya, 2021).

Permasalahan *overload* yang terjadi di TPA Mrican pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kemajuan dan tuntutan Zaman dimana populasi penduduk selalu bertambah, sekali pun angka kematian juga turut menyertai. Namun jika fokus terhadap fakta di lapangan, kapasitas sampah yang melebihi batas maksimum adalah sampel relevan untuk mengukur sejauh mana indeks kehidupan masyarakat di Ponorogo. Pemkab Ponorogo melalui DLH terbukti tidak hanya tinggal diam dalam menangani perkara sampah, namun di sisi lain solusi dan rumusan ide yang ditawarkan juga mendapat sorotan lain dari komunitas peduli lingkungan di Ponorogo. Ketika segala pihak menginginkan terciptanya iklim dan kualitas lingkungan yang sehat, maka wajar jika muncul ide dan gagasan untuk mencari jalan keluar (solusi). Maka dari itu, sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Dalam Mengatasi *Overload* Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Desa Mrican Kec. Jenangan.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dalam mengatasi *overload* Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Mrican Kecamatan Jenangan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dalam mengatasi *overload* Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Desa Mrican Kecamatan Jenangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Fakultas dan Program Studi

Penelitian ini sebagai bahan yang bersifat ilmiah untuk referensi maupun sebagai bahan penunjang kebutuhan bagi lingkungan kampus, Prodi Ilmu Pemerintahan, Dimana kajian tentang upaya Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dalam mengatasi persoalan *overload* adalah isu yang sangat vital untuk diangkat ke permukaan karena sifatnya bergesekan langsung dengan kualitas hidup dalam ekosistem alam (lingkungan) yang secara tidak langsung membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai media untuk menyalurkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan, dengan mengacu pada teori-teori yang berlaku untuk mendukung penelitian dan menjelaskan keadaan maupun permasalahan konkrit yang ada atau ditemukan di lapangan dalam konteks upaya Dinas Lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup akibat *overload* di TPA Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan tambahan untuk mengkaji secara mendalam dan menemukan fakta-fakta baru dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo akan mampu merumuskan kebijakan secara lebih solutif mengenai persoalan *overload* sampah di TPA Mrican.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan dampak edukasi dan terciptanya pola hidup yang lebih cerdas dari seluruh masyarakat Ponorogo melalui pemahaman terhadap *overload* sampah yang ada di TPA Desa Mrican Kec. Jenangan.

E. Penegasan Istilah

Peneliti membuat semacam batasan atau pun konsep definisi istilah dalam memahami judul penelitian tentang **“Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Dalam Mengatasi *Overload* Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Desa Mrican Kec. Jenangan”** agar tidak terjadi kesalahan penafsiran diluar konteks sebenar-benarnya dari yang dimaksud. Yakni sebagai berikut :

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kata upaya adalah menitikberatkan kepada suatu aktivitas, kegiatan, maupun kiat ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Upaya merupakan serangkaian cara yang dilakukan untuk mencari jalan keluar atas dasar ditemukannya persoalan dengan bermodalkan daya (kemampuan, kekuatan).

Skripsi ini berfokus pada upaya dengan subjeknya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo dalam upaya mencari solusi/jalan keluar akibat permasalahan sampah yang *overload* serta sudah bertahun-tahun terjadi hingga menyentuh skala darurat.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas merupakan satuan struktur organisasi pemerintahan yang masing-masing memiliki tugas pokok & fungsi berbeda-beda sesuai dengan bidang masing-masing. Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dalam merealisasikan program kerja pemerintah di tingkat daerah secara bertanggungjawab (KBBI, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa tugas dalam mengurus persoalan lingkungan di Ponorogo yang diantaranya adalah: perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, pelaporan kebijakan, pelaksanaan administrasi dinas dan urusan-urusan lain dibawah naungan Bupati.

3. Overload

Istilah *Overload* menurut KBBI merupakan serapan gabungan dari kata benda dan kata kerja yang membentuk satu padanan kata dengan esensi bahwa *over* merupakan definisi yang menggambarkan sesuatu terlalu besar/banyak. Sedangkan *load* berarti mengandung arti memuat/mengisi terhadap objek yang dibawa oleh kata *over* (Maharani, 2016). Sesuai dengan tema penelitian

ini, yang dimaksud dengan *overload* adalah konteks yang menggambarkan kelebihan kapasitas sampah pada TPA di Desa Mrican Kabupaten Ponorogo.

4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

TPA merupakan sarana fisik yang digunakan untuk membuang sisa sampah padat perkotaan ke permukaan tanah di bumi dan ditutup pada setiap akhir operasi. Manajemen pengelolaan TPA biasanya dioperasikan secara sistematis dengan tujuan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat umum dan lingkungan akibat adanya pencemaran serta polusi (Tchobanoglous dalam Wedana Yasa et al., 2013).

F. Landasan Teori

1. Hakikat Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai ruang dimensi yang menopang berlangsungnya segala aktivitas fisik dari keseluruhan makhluk hidup di dalamnya. Kebebasan makhluk hidup untuk mengakses keanekaragaman yang ada pada suatu lingkungan sama sekali tidak dibatasi, dalam arti lain makhluk hidup seperti hewan dan manusia dapat terus mengembangkan kualitas hidup seiring berjalannya waktu. Diantara keseluruhan jenis makhluk hidup, manusia menempati urutan pertama dalam potensi pemanfaatan karena memiliki daya dan akal (Rusdina, 2015).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan segenap karakteristiknya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu

komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem kehidupan dan mampu untuk memberikan pengaruh satu sama lain secara alami sehingga mencapai keseimbangan (Elly Setiadi dalam Rusdina, 2015).

Teori diatas memiliki definisi yang hampir sama dimana lingkungan hidup diposisikan sebagai ruang, wadah, maupun tempat untuk menaungi segala aktivitas kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Lingkungan hidup memiliki sifat luas karena keberadaannya meliputi seluruh permukaan bumi, maka dari itu habitat makhluk hidup akan mudah terbentuk dan menemukan pola nya sendiri-sendiri mengingat perbedaan lokasi dan keadaan dari masing-masing potret lingkungan (alam). Terbentuknya kualitas lingkungan hidup tergantung dari seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh manusia sebagai subjek paling dominan untuk mengelola kekayaan hayati di sekitar, maka dari itu sejatinya hak atas kebebasan akses untuk memanfaatkan kekayaan lingkungan tidak boleh menyeleweng dan menerobos batas-batas etika lingkungan hidup.

2. Efek Penumpukan Sampah

Menurut Takbiran (2020) Sampah saat ini menjadi salah satu permasalahan yang dialami berbagai negara di dunia dikarenakan keberadaannya yang semakin meningkat setiap tahun, sampah terbagi tiga macam, yang pertama organik atau yang mudah didaur ulang yang kedua anorganik atau yang sulit diurai dan yang ketiga B3 (bahan beracun & berbahaya). Ketiga nya tetap menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik (Our Word in Data)

berbagai negara di Eropa dan Amerika Utara memiliki total tumpukan sampah yang tinggi, cenderung memiliki resiko rendah mengalami penceraan, polusi maupun kerusakan lingkungan kerana sampah. Data menunjukan negara-negara yang memiliki masalah dalam mengelola sampah berada di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Indonesia termasuk yang bermasalah dalam pengelolaan sampahnya ada sekitar 80.235 ton/hari tumpukan sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dibuang disembarang tempat. Banyak yang tidak menyadari pemumpukan sampah berlebih diantaranya dapat menyebabkan :

- a. Efek Rumah Kaca
- b. Pencemaran Udara
- c. Pencemaran Tanah dan air.
- d. Kualitas tanah dan air menurun
- e. Kemampuan resapan air menurun
- f. Kualitas lahan pertanian menurun
- g. Banjir

3. Komponen Lingkungan Hidup

Menurut Rusdina (2015) komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu) dan faktor biotik (tumbuhan, hewan, dan manusia). Lingkungan bisa terdiri atas:

- a. Lingkungan alam, adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Jenis lingkungan alam antara lain air, tanah, pohon, udara, sungai dll sedangkan lingkungan
- b. Lingkungan buatan, adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia misalnya seperti jembatan, jalan, bangunan rumah, taman kota.

Komponen yang disediakan oleh lingkungan mampu menyalurkan sumber penghidupan bagi makhluk hidup di dalamnya terutama manusia. Pola perilaku dan karakteristik maupun sifat dari manusia dapat diukur dari tempat (lingkungan) dimana kelompok/individu bernaung. Lingkungan berpotensi untuk memajukan peradaban manusia ketika manusia berhasil membaca peluang serta menjawab tantangan zaman dari waktu ke waktu, untuk kemudian selanjutnya tinggal mengukur bagaimana cara manusia (kelompok/individu) untuk membangun peradaban melalui perbaikan dengan cara menata/mengubah/memperbaiki lingkungan.

4. Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang mencuat ke permukaan di berbagai wilayah sejatinya merupakan masalah kolektif baik perorangan, keluarga, masyarakat, kelompok, bahkan global (dunia). Peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan tingkah laku manusia selalu mencari topik pembahasan hangat baik di negara maju maupun negara berkembang (Bintarto, 1997).

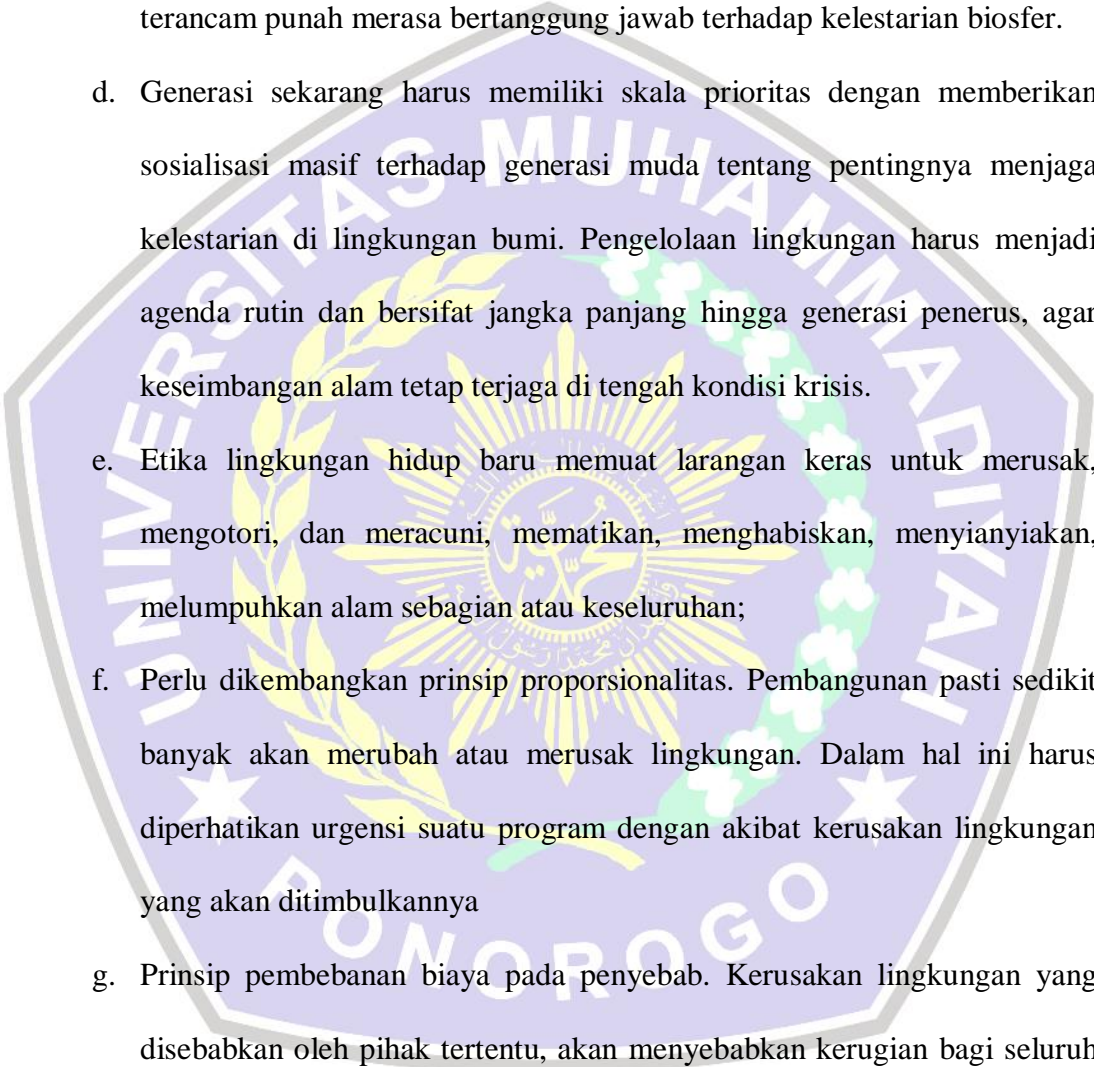
Toleransi mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi hampir di seluruh belahan bumi tidak dapat diperpanjang lagi mengingat adanya ancaman dari

segi kesehatan dan keselamatan. Bagaimana pun ketika ekosistem lingkungan tidak seimbang atau terlalu timpang, maka sederet permasalahan akan zzkembali mengancam kehidupan manusia. Maka dari itu, masyarakat global perlu untuk menyadari dan memberikan perhatian penuh dalam rangka menghadapi krisis mendesak lingkungan apabila tidak ingin mendapat kerugian (malapetaka) lebih besar. Ulah kasar manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada kelestarian biosfer dan keseimbangan alam (Suseno, 1998).

5. Strategi Membangun Etika Lingkungan

Berikut ini ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan menurut Magnis-Suseno (1993):

- a. Hal mutlak yang harus dilakukan manusia terhadap alam adalah dengan cara menghargai setinggi-tingginya. Memandang alam sebagai suatu hal yang berharga, bukan hanya memanfaatkan keberadaannya semata tanpa memiliki rasa kepedulian tinggi. Apabila manusia hendak memanfaatkan alam, hendaknya dilakukan secara bijak (tidak berlebih-lebihan) serta yang terpenting adalah berusaha untuk membumikan kiat-kiat untuk pelestarian.
- b. Manusia harus menanamkan suatu kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan bersih, sehat, serta tetap asri.

- 
- c. Manusia harus selalu mengupayakan pikiran sadar terhadap kelestarian ekosistem lingkungan, serta sadar diri bahwa manusia sendiri termasuk sebagai bagian dari ekosistem yang perlu waktu hidup jangka panjang sehingga ketika keseimbangan terganggu maka kehidupan juga ikut terancam punah merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer.
- d. Generasi sekarang harus memiliki skala prioritas dengan memberikan sosialisasi masif terhadap generasi muda tentang pentingnya menjaga kelestarian di lingkungan bumi. Pengelolaan lingkungan harus menjadi agenda rutin dan bersifat jangka panjang hingga generasi penerus, agar keseimbangan alam tetap terjaga di tengah kondisi krisis.
- e. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyianiyakan, melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan;
- f. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti sedikit banyak akan merubah atau merusak lingkungan. Dalam hal ini harus diperhatikan urgensi suatu program dengan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya
- g. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu, akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Dianggap tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung seluruh akibatnya. Akan tetapi pihak penyebab kerusakan lingkungan lah yang harus bertanggung jawab, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

G. Definisi Operasional

Menurut Noor (2011) definisi operasional merupakan parameter yang menentukan maupun mengukur garis besar dengan cara memanfaatkan variabel dari judul penelitian seperti perilaku, sifat, sikap, dan aspek pendukung lainnya. Indikator dalam penelitian berjudul “**Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Dalam Mengatasi *Overload* Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Desa Mrican Kec. Jenangan**” ini dapat ditemukan berdasarkan data observasi serta sumber literasi pendukung, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh DLH Ponorogo dalam mengatasi persoalan *overload* sampah di TPA Mrican:
 - a) Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Mrican
 - b) Memiliki rencana untuk melakukan pembukaan lahan TPA baru dengan luas memadai (cukup).
 - c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih bersikap meminimalisir penggunaan barang-barang yang sifatnya sekali pakai (seperti plastik).
 - d) Mendirikan bank sampah (TPS terpadu) di lingkungan Desa agar tidak selalu dibuang ke TPA.
 - e) Mendirikan Rumah Kompos yang terletak di 2 kecamatan berbeda yakni Balong dan Kauman.
2. Indikator *overload* TPA dapat diukur dari beberapa faktor seperti:

- a. Penumpukan sampah yang berlebihan (*overload*) bahkan hampir setiap hari
- b. Ancaman kesehatan dan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat terutama yang tinggal sekitar Desa Mrican
- c. Prediksi dan kekhawatiran akan timbulnya ancaman bencana tanah longsor akibat tanah menampung beban berlebih, serta kebakaran akibat tingginya gas metana dari kandungan sampah.

Indikator upaya dari DLH di atas adalah diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti yang bersumber dari literasi konkrit atas dasar kebenaran data lapangan (hasil wawancara dengan Kepala UPTD pengelolaan sampah TPA Mrican). Dengan kata lain definisi operasional di atas merupakan garis besar dari persoalan mendasar terkait *overload* sampah di TPA Mrican Kec. Jenangan Ponorogo, serta untuk mengukur sejauh mana program, kebijakan, ide, maupun perencanaan dimiliki oleh DLH Ponorogo dalam rangka upaya solutif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik dari rencana penelitian ini, maka jenis penelitian akan bersifat deskriptif-kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah dengan menitik beratkan pada kredibilitas informasi yang hendak digali. Menurut Sumanto dalam Sukamadinata (2005) pendekatan deskriptif-kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian dengan usaha untuk menjelaskan secara rinci, menafsirkan (menginterpretasikan) suatu kondisi atau hubungan sebab

akibat, suatu fenomena yang sedang tumbuh dan berlangsung, serta suatu akibat yang nampak memberikan pengaruh dalam suatu fenomena (kasus).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo yang tepatnya berada di Desa Mrican Kec. Siman Kab. Ponorogo. *Overload* sampah yang terjadi di TPA Desa Mrican merupakan permasalahan mendasar yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas kehidupan masyarakat, di sisi lain *overload* yang terjadi di TPA Desa Mrican diprediksi oleh DLH Ponorogo berpotensi untuk menimbulkan tanah longsor dan kebakaran akibat tingginya gas metana.

3. Teknik Penentuan Informan

Sumber data utama dari penelitian ini adalah informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ponorogo dengan mempertimbangkan kompetensi dari informan yang dianggap lebih memiliki pemahaman lebih terkait dengan konteks permasalahan lingkungan hidup akibat adanya *overload* sampah di TPA Mrican Ponorogo.

Informan ini adalah berstatus sebagai subjek yang tentunya mengamati perkembangan di lapangan dimana dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling*, yakni memilih perwakilan dari suatu kelompok dan ditentukan berdasarkan kriteria ideal atau kompeten untuk dapat menjawab persoalan suatu permasalahan secara sebagaimana mestinya

(Suhartono, 2011). Melalui metode *purposive sampling*, besar kemungkinan akan diketahui bagaimana gambaran real atau fakta lapangan yang hendak diangkat dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan penjelasan terbaik. Selain itu beberapa informan pendukung juga akan didatangi guna menambah keabsahan data dalam penelitian ini, beberapa informan tersebut adalah:

- a. Kepala Desa Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo : 1 Orang
 - b. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo : 3 Orang
 - c. Ketua/anggota PRR (Ponorogo Resik-Resik). : 1 Orang
 - d. Tokoh Masyarakat (Kamituwo) : 1 Orang
 - e. Tokoh Pemuda (Karangtaruna) : 1 Orang
 - f. Petugas Pengangkutan Sampah : 1 Orang
- Total 8 Orang

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Rencana pengumpulan data adalah akan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pertanyaan tidak terstruktur, karena bentuk pertanyaan menyesuaikan kondisi dan perkembangan situasi di lapangan. Adapun wawancara bisa saja tidak dilakukan secara langsung, karena menyesuaikan dengan perkembangan ke adaan dimasa pandemi ini. Adapun cara cara wawancara mungkin saja dapat dilakukan via telepon, atau dengan tetap mendatangi lokasi penelitian secara langsung dan melakukan wawancara tatap muka (dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang ada serta menerapkan protokol

kesehatan di masa COVID-19). Wawancara merupakan alat yang paling vital dan paling digandrungi pada penelitian kualitatif karena peneliti berpotensi untuk menemukan banyak jawaban yang beragam dari para informan, sehingga konteksnya pun semakin beragam (Sarosa dalam Helaluddin, 2019).

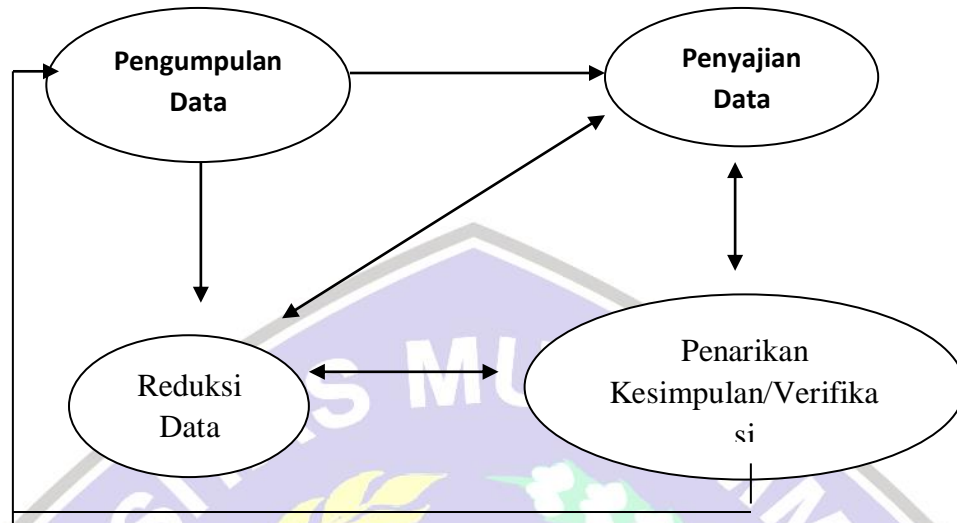
b) Dokumentasi

Menurut Danial dalam Arikunto (2010), dokumentasi merupakan serangkaian kegiatan yang mengumpulkan beberapa bahan data sesuai dengan kebutuhan peneliti dan disesuaikan dengan relevansi topik penelitian. Contoh perolehan data yang ada dalam dokumentasi biasanya meliputi: peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, grafik, gambar, surat-surat, dsb.

5. Teknik Analisis Data

Dalam topik penelitian ini, rencana teknik analisis yang di gunakan adalah dengan pendekatan “*Interpretatif Approach*”. Bentuk pendekatan ini mencoba untuk menangkap esensi dan tujuan. Penelitian akan mereduksi data untuk menemukan pola-pola dari aktivitas, aksi, maupun arti dari fenomena yang ada. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah “*Narrative Analysis*” dimana peneliti dalam bentuk tulisan atau narasi (Miles & Hubberman dalam Helaluddin, 2019). Skema dan penjabarannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Analisis Data Penelitian Huberman & Miles



Sumber: diolah dari (Idrus, 2009)

a. Penggalan Data

Proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan aktivitas wawancara dan observasi lapangan secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan.

b. Reduksi data

Kegiatan yang meliputi revisi maupun memperbaiki susunan data lapangan dengan tujuan menciptakan efisiensi dan terwujudnya sistematika data secara lebih baik. Proses reduksi data dapat dilakukan sepanjang waktu oleh peneliti sepanjang tidak mengurangi substansi yang sebenarnya, perubahan narasi atau kalimat boleh dilakukan baik selama masa penelitian maupun usai masa penelitian berlangsung.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menampilkan dengan penambahan berbagai visualisasi berupa tabel, grafik, gambar, suara, maupun video dengan tujuan memudahkan pemahan bagi para pembaca.

d. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Miles & Hubberman menjabar 3 cara untuk menganalisis data kualitatif, yaitu (reduksi data, penyajian data & penyimpulan). Fase Reduksi data adalah (proses pemangkasan dengan menekan pada perampingan data mentah tertulis). Presentasi data adalah aktivitas yang memungkinkan peneliti melakukan perbaikan narasi. Sedangkan kesimpulan adalah hak bebas peneliti menyusun ulang kalimat atau deksripsi informan namun tetap mengacu pada makna sebenarnya.

